

**TESIS**  
**KEEFEKTIVITAS TATA KELOLA PARADIPLOMASI DI**  
**LINGKUNGAN *FREE TRADE ZONE* (FTZ) BATAM**

Disusun Guna Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Master  
pada Program Studi Magister Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



**PEMBIMBING TESIS**  
**Dr. SURWANDONO**

**MAGISTER ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**  
**2019**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**KEEFEKTIVITAS TATA KELOLA PARADIPLOMASI DI  
LINGKUNGAN *FREE TRADE ZONE* (FTZ) BATAM**

**Disusun oleh:**

**RIZQI APRIANI PUTRI**

**20171060009**

Telah di pertahankan dalam Ujian Tesis, dinyatakan lulus dan  
disahkan di hadapan Tim Penguji Program Magister Ilmu  
Hubungan Internasional Program Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pada :

Hari/Tanggal : Selasa/ 1 Oktober 2019

Pukul : 10.00 WIB

Tempat : Study Hall MIHI



Tim Penguji

**Dr. Surwandono**

Pembimbing

**Dr. Takdir Ali Mukti**

**Dr. Sidik Jatmika**

Penguji I

Penguji II

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul keefektifitas tata kelola paradiplomasi di lingkungan *free trade zone* batam adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi lainnya maupun di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Mengenai tesis ini, tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali dijadikan sebagai referensi bagi penulis dalam penulisan naskah dengan pencantuman nama didalam daftar pustaka. Dalam hal ini, pernyataan saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila terjadi ketidaksesuaian atau plagiarism maka saya akan bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku di lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Yogyakarta, 18 September 2019



Rizqi Apriani Putri

## **MOTTO**

Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi  
dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan  
semangat

Winston Churchill

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Tulisan ini, saya persembahkan kedua orang tua saya Drs. H. Firdaus M.si dan Hj. Sunarsih dan keluarga besar yang berperan penting didalam hidup saya. Kepada seluruh dosen MIHI yang memberikan ilmunya kepada saya, terimakasih bapak dan ibu atas ilmunya. Terkhusus juga kepada Bapak Surwandono selaku pembimbing tesis dan juga yang memberikan kesempatan kepada saya ikut berkontribusi penelitian bapak, serta menjadi asisten dosen. Kepada Pak Ali Maksum yang memberikan saya kesempatan untuk membantu bapak sebagai asisten dosen, pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Kepada Pak Ahmad Sahide yang menjadi dosen, mentor, sekaligus bapak bagi kami semua di MIHI angkatan 10. Saya tidak akan pernah lupa pengalaman saya dibantu oleh bapak, yang selalu mengayomi kami semuanya. Dan tak lupa kepada Bu Inung, dan Mas Afif yang membantu saya, dan sabar menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami, dan maaf sering buat kantor menjadi berisik. Teman-teman MIHI angkatan 10, saya banyak belajar dari kalian semua, *see you on the top, guys!*. Teruntuk orang-orang yang sudah menolong dan mensupport, mendoakan saya sampai saat ini, terimakasih banyak! Semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk segala kalangan dan diberi kemudahan untuk kedepannya.

## KATA PENGANTAR

Asslammu'alaikum, Wr. Wb

Puji syukur alhamdulillah penulis haturkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, dan kekuatan kepada penulis dalam menyelesaikan tulisan ilmiah berupa tesis. Shalawat dan salam penulis kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan nilai-nilai kehidupan dengan sempurna sehingga kita mampu menjadi insan yang layak disebut sebagai manusia. Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat-syarat dalam memperoleh gelar strata (S-2) dalam program Magister Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul **“Keefektivitas Tata Kelola Paradiplomasi di Lingkungan *Free Trade Zone* Batam”**.

Penulis sangat menyadari bahwa penyelesaian tesis ini masih banyak kekurangan baik dari segi redaksional, maupun substansial. Penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta arahan dari berbagai pihak di lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta maupun pihak dari luar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada:

1. Allah Subhanahu Wata'ala yang mmeberikan Rahmat dan dengan Karunia-Nya lah, penulis bisa merampungkan penulisan ini sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

2. Bapak Dr. Surwondo selaku ketua jurusan Magister Ilmu Hubungan Internasional, sekaligus menjadi dosen pembimbing penulis
3. Bapak Dr. Ahmad Sahide selaku Sekretaris jurusan Magister Ilmu Hubungan Internasional
4. Bapak dan Ibu dosen jurusan Magister Ilmu Hubungan Internasional yang sudah memberikan pengajaran dan bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa Magister Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
5. Segenap staf program Magister Ilmu Hubungan Internasional yang telah memberikan pelayanan terbaiknya.
6. Kawan-kawan MIHI angkatan 10 dan seluruh MIHI UMY

Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat kepada ilmu pengetahuan dan menjadi referensi bagi yang ingin meneliti. Dan segala bantuan dan doa yang diberikan kepada penulis, semoga dibalas oleh Allah Swt. Aamiin.

Wassalammu'alaikum, Wr. Wb.

**Yogyakarta, 18 September 2019**

**Rizqi Apriani Putri**

## DAFTAR ISI

Cover .....	i
Halaman Pengesahan .....	iii
Surat Pernyataan Keaslian .....	iv
Motto .....	v
Halaman Persembahan .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi .....	ix
Daftar Tabel .....	xvii
Daftar Skema.....	xx
Daftar Gambar.....	xx
Abstrak .....	xxi

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan Penelitian .....	9
C. Kontribusi Penelitian .....	7
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Studi Pustaka .....	10
F. Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Tesis ini .....	20
G. Kerangka Teori .....	22
1. Teori Efektivitas .....	22
2. Teori Liberalisme .....	25
3. Konsep Paradiplomasi .....	27
H. Hipotesa .....	34
I. Metode Penelitian .....	35



1. Jenis Penelitian .....	35
a. Sumber data .....	36
b. Objek Penelitian .....	36
2. Jangkauan dan Lokasi Penelitian .....	37
3. Teknik Pengumpulan Data .....	37
4. Teknik Analisa Data .....	39
J. Sistematika Penulisan .....	41

## **BAB II DINAMIKA PENYELENGGARAAN PARADIPLOMASI DI BATAM**

A. <i>Free Trade Zone</i> .....	42
B. Perkembangan Otonomi Khusus Batam .....	46
C. Perkembangan Paradiplomasi Batam .....	53
D. Regulasi Nasional terkait <i>Free Trade Zone</i> Batam .....	60
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam .....	60
2. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Kepulauan Riau .....	61
3. Keputusan Bersama Menteri dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor KP 994 Tahun 2017, Nomor 1456/SPJ/KA/1/2017 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam.....	62

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabean, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada di Kawasan yang telah ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas .....64
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 47/PMK.04/2012 Tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai .....68
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang .....72
7. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam .....	74
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2012 Tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas .....	75
9. Peraturan Menteri Perdagangan 45/M- DAG/PER/7/2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penertiban Perizinan di Bidang Perdagangan Luar Negeri Kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun .....	78
10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Umum Pemasukan Barang Ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam .....	80

### **BAB III REGULASI FTZ DI BATAM**

Analisis Isi Terhadap Regulasi FTZ Batam .....	86
A. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam .....	86

1. Aktor .....	86
2. Tata Kelola Perdagangan Bebas .....	8
3. Efisiensi Manajemen Pelabuhan .....	87
B. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Kepulauan Riau	89
1. Aktor .....	89
2. Tata Kelola Perdagangan Bebas .....	89
3. Efisiensi Manajemen Pelabuhan .....	89
C. Keputusan Bersama Menteri dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor KP 994 Tahun 2017, Nomor 1456/SPJ/KA/1/2017 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam	91
1. Aktor .....	91
2. Tata Kelola Perdagangan Bebas .....	91
3. Efisiensi Manajemen Pelabuhan .....	91
D. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabean, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada di Kawasan yang telah ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas .....	93
1. Aktor .....	93
2. Tata Kelola Perdagangan Bebas .....	93
3. Efisiensi Manajemen Pelabuhan .....	93
E. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor	

47/PMK.04/2012 Tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai .....	95
1. Aktor .....	95
2. Tata Kelola Perdagangan Bebas .....	95
3. Efisiensi Manajemen Pelabuhan .....	95
F. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang .....	97
1. Aktor .....	97
2. Tata Kelola Perdagangan Bebas .....	97
3. Efisiensi Manajemen Pelabuhan .....	97
G. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam .....	99
1. Aktor .....	99
2. Tata Kelola Perdagangan Bebas .....	99
3. Efisiensi Manajemen Pelabuhan .....	99

H. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2012 Tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas .....	101
1. Aktor .....	101
2. Tata Kelola Perdagangan Bebas .....	101
3. Efisiensi Manajemen Pelabuhan .....	101
I. Peraturan Menteri Perdagangan 45/M-DAG/PER/7/2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penertiban Perizinan di Bidang Perdagangan Luar Negeri Kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun .....	103
1. Aktor .....	103
2. Tata Kelola Perdagangan Bebas .....	103
3. Efisiensi Manajemen Pelabuhan .....	103
J. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Umum Pemasukan Barang Ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam .....	105
1. Aktor .....	105
2. Tata Kelola Perdagangan Bebas .....	105

3. Efisiensi Manajemen Pelabuhan .....	105
<b>BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN FTZ BATAM BELUM EFEKTIF</b>	
A. Regulasi FTZ yang Sangat Birokratis .....	109
B. Tata Kelola Pelabuhan Bebas yang Kurang Kompetitif 119	
C. Efisiensi Pengelolaan Manajemen Pelabuhan yang Kurang Kompetitif .....	128
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>137</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>140</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>146</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Kawasan Ekonomi Khusus di China, India, dan Indonesia .....	7
Tabel 1.2 Literature Review.....	18
Tabel 1.3 Indikator Regulasi FTZ .....	40
Tabel 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam .....	88
Tabel 3.2 Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Kepulauan Riau .....	90
Tabel 3.3 Keputusan Bersama Menteri dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor KP 994 Tahun 2017, Nomor 1456/SPJ/KA/1/2017 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam.....	92
Tabel 3.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabean, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada di Kawasan yang telah ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.....	94



- Tabel 3.5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 47/PMK.04/2012 Tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai .....96
- Tabel 3.6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang .....98
- Tabel 3.7 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam..... 100
- Tabel 3.8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2012 Tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan

	Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.....	102
Tabel 3.9	Peraturan Menteri Perdagangan 45/M-DAG/PER/7/2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penertiban Perizinan di Bidang Perdagangan Luar Negeri Kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun .....	104
Tabel 3.10	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Umum Pemasukan Barang Ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam .....	106
Tabel 4.1	Indikator Aktor .....	117
Tabel 4.2	Indikator Tata Kelola Perdagangan Bebas .....	125
Tabel 4.3.1	Ekspor Kota Batam Menurut Pelabuhan Muat Kota Batam Tahun 2018 .....	133
Tabel 4.3.2	Indikator Efisiensi Manajemen Pelabuhan .....	134

## **DAFTAR SKEMA**

Skema 1.1 Pola Hubungan Internasional Bersifat Transnasional, Menurut Keohane dan J.S. Nye .....	31
Skema 1.2 Pola Hubungan Internasional bersifat Transnasional, Hal Mana Local Government (Pemerintah Daerah) Merupakan Aktor atau Pelaku “Baru” Hubungan Internasional Menurut Sidik Jatmika .....	32
Skema 1.3 Aplikasi Teori Pola Hubungan Internasional yang Melibatkan Local Government (Pemerintah Daerah) dengan Kebijakan FTZ .....	33

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Peta Provinsi Kepulauan Riau .....	3
Gambar 4.1 Lokasi Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam .....	127